



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1241/M.KT.03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2024.

15 Juli 2024

Yth. Daftar terlampir
di
Tempat

Dalam rangka memastikan ketercapaian target pembangunan pada RPJMN 2020 - 2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) akan melakukan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024. Kegiatan evaluasi SPBE dimaksud akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Demi kelancaran pelaksanaan evaluasi dimaksud, Koordinator SPBE dalam hal ini Sekretaris Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar mengoordinasikan pelaksanaan di internal sesuai dengan agenda kegiatan evaluasi SPBE yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri tersebut. Adapun mekanisme kegiatan akan dilakukan secara daring (online) melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi evaluasi SPBE;
2. Penilaian Mandiri;
3. Penilaian Dokumen;
4. Penilaian Interview; dan
5. Penilaian Visitasi (apabila diperlukan).

Sehubungan dengan mekanisme tersebut, kami mohon para Koordinator SPBE dapat menunjuk 2 (dua) orang selaku PIC (perwakilan) masing-masing instansinya. Konfirmasi para perwakilan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat disampaikan melalui tautan <https://konfirmasi.menpan.go.id> paling lambat tanggal 21 Juli 2024. Jadwal Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran II.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi**

Abdullah Azwar Anas

Tembusan
Sekretaris Kementerian PANRB.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 240708DNKN



DAFTAR PENERIMA SURAT

Kementerian

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
6. Menteri Kepala Badan Usaha Milik Negara
7. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
9. Menteri Pemuda dan Olahraga
10. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
11. Menteri Dalam Negeri
12. Menteri Luar Negeri
13. Menteri Pertahanan
14. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
15. Menteri Keuangan
16. Menteri Pertanian
17. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
18. Menteri Perhubungan
19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
20. Menteri Kesehatan
21. Menteri Agama
22. Menteri Ketenagakerjaan
23. Menteri Sosial
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25. Menteri Kelautan dan Perikanan
26. Menteri Komunikasi dan Informatika
27. Menteri Perdagangan
28. Menteri Perindustrian
29. Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
30. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan
EkonomiKreatif
31. Menteri Sekretariat Negara
32. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
PerencanaanPembangunan Nasional
33. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
34. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

DAFTAR PENERIMA SURAT

Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala Badan Pusat Statistik
4. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
5. Kepala Badan Informasi Geospasial
6. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8. Kepala Perpustakaan Nasional RI
9. Kepala Badan Standardisasi Nasional
10. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
11. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
12. Kepala Lembaga Ketahanan Nasional RI
13. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
14. Kepala Badan Narkotika Nasional
15. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
16. Kepala Badan Keamanan Laut
17. Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan
18. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
20. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
21. Kepala Badan Pangan Nasional

DAFTAR PENERIMA SURAT

Alat Negara

Kepada Yth.

1. Jaksa Agung Republik Indonesia
2. Kepala Badan Intelijen Negara
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Lembaga Pemerintah Lainnya

Kepada Yth.

1. Sekretaris Kabinet
2. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

Sekretariat Lembaga Negara

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
7. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Lembaga Penyiaran Publik

Kepada Yth.

1. Direktur Utama Televisi Republik Indonesia
2. Direktur Radio Republik Indonesia

DAFTAR PENERIMA SURAT

Lembaga Non Struktural

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
3. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
4. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
6. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
7. Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
9. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
10. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
11. Sekretaris Komisi Kejaksaan
12. Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional
13. Sekretaris Dewan Pers
14. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional
15. Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi
16. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
17. Ketua Lembaga Sensor Film
18. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
19. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden
20. Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden
21. Kepala Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas Batam
22. Kepala Badan Pengusahaan dan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang

DAFTAR PENERIMA SURAT

Pemerintah Provinsi

Kepada Yth.

1. Gubernur Aceh;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Gubernur Sumatera Barat;
4. Gubernur Riau;
5. Gubernur Kepulauan Riau;
6. Gubernur Jambi;
7. Gubernur Sumatera Selatan;
8. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
9. Gubernur Bengkulu;
10. Gubernur Lampung;
11. Gubernur DKI Jakarta;
12. Gubernur Jawa Barat;
13. Gubernur Banten;
14. Gubernur Jawa Tengah;
15. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Gubernur Jawa Timur;
17. Gubernur Bali;
18. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
19. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
20. Gubernur Kalimantan Barat;
21. Gubernur Kalimantan Tengah;
22. Gubernur Kalimantan Selatan;
23. Gubernur Kalimantan Timur;
24. Gubernur Kalimantan Utara;
25. Gubernur Sulawesi Utara;
26. Gubernur Sulawesi Barat
27. Gubernur Sulawesi Tengah;
28. Gubernur Sulawesi Tenggara;
29. Gubernur Sulawesi Selatan;
30. Gubernur Gorontalo;
31. Gubernur Maluku;
32. Gubernur Maluku Utara;
33. Gubernur Papua Barat;
34. Gubernur Papua;
35. Gubernur Papua Tengah;
36. Gubernur Papua Selatan;
37. Gubernur Papua Pegunungan;
38. Gubernur Papua Barat Daya;

DAFTAR PENERIMA SURAT

Pemerintah Kabupaten/Kota

Kepada Yth.

1. Bupati Aceh Besar
2. Bupati Pidie
3. Bupati Aceh Utara
4. Bupati Aceh Timur
5. Bupati Aceh Selatan
6. Bupati Aceh Barat
7. Bupati Aceh Tengah
8. Bupati Aceh Tenggara
9. Bupati Simeulue
10. Bupati Bireuen
11. Bupati Aceh Singkil
12. Bupati Aceh Barat Daya
13. Bupati Gayo Lues
14. Bupati Aceh Tamiang
15. Bupati Nagan Raya
16. Bupati Aceh Jaya
17. Bupati Bener Meriah
18. Bupati Pidie Jaya
19. Bupati Deli Serdang
20. Bupati Karo
21. Bupati Langkat
22. Bupati Tapanuli Tengah
23. Bupati Simalungun
24. Bupati Labuhanbatu
25. Bupati Dairi
26. Bupati Tapanuli Utara
27. Bupati Tapanuli Selatan
28. Bupati Asahan
29. Bupati Nias
30. Bupati Toba
31. Bupati Mandailing Natal
32. Bupati Nias Selatan
33. Bupati Humbang Hasundutan
34. Bupati Pakpak Bharat
35. Bupati Samosir
36. Bupati Serdang Bedagai
37. Bupati Padang Lawas
38. Bupati Padang Lawas Utara
39. Bupati Batubara
40. Bupati Labuhanbatu Selatan
41. Bupati Labuhanbatu Utara
42. Bupati Nias Barat

43. Bupati Nias Utara
44. Bupati Kampar
45. Bupati Bengkalis
46. Bupati Indragiri Hulu
47. Bupati Indragiri Hilir
48. Bupati Pelalawan
49. Bupati Rokan Hulu
50. Bupati Rokan Hilir
51. Bupati Siak
52. Bupati Kuantan Singingi
53. Bupati Kepulauan Meranti
54. Bupati Bintan
55. Bupati Karimun
56. Bupati Natuna
57. Bupati Lingga
58. Bupati Kepulauan Anambas
59. Bupati Agam
60. Bupati Pasaman
61. Bupati Limapuluh Kota
62. Bupati Solok
63. Bupati Padang Pariaman
64. Bupati Pesisir Selatan
65. Bupati Tanah Datar
66. Bupati Sijunjung
67. Bupati Kep. Mentawai
68. Bupati Solok Selatan
69. Bupati Dharmasraya
70. Bupati Pasaman Barat
71. Bupati Batang Hari
72. Bupati Tanjung Jabung Barat
73. Bupati Bungo
74. Bupati Merangin
75. Bupati Kerinci
76. Bupati Sarolangun
77. Bupati Tebo
78. Bupati Muaro Jambi
79. Bupati Tanjung Jabung Timur
80. Bupati Musi Banyuasin
81. Bupati Ogan Komering Ulu
82. Bupati Muara Enim
83. Bupati Lahat
84. Bupati Musi Rawas
85. Bupati Ogan Komering Ilir
86. Bupati Banyuasin
87. Bupati Ogan Komering Ulu Timur
88. Bupati Ogan Komering Ulu Sel.
89. Bupati Ogan Ilir
90. Bupati Empat Lawang
91. Bupati Musi Rawas Utara
92. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

93. Bupati Bengkulu Utara
94. Bupati Bengkulu Selatan
95. Bupati Rejang Lebong
96. Bupati Kaur
97. Bupati Seluma
98. Bupati Mukomuko
99. Bupati Kepahiang
100. Bupati Lebong
101. Bupati Bengkulu Tengah
102. Bupati Lampung Selatan
103. Bupati Lampung Tengah
104. Bupati Lampung Utara
105. Bupati Lampung Barat
106. Bupati Tulang Bawang
107. Bupati Tanggamus
108. Bupati Way Kanan
109. Bupati Lampung Timur
110. Bupati Pesawaran
111. Bupati Tulang Bawang Barat
112. Bupati Pringsewu
113. Bupati Mesuji
114. Bupati Pesisir Barat
115. Bupati Bangka
116. Bupati Belitung
117. Bupati Bangka Barat
118. Bupati Bangka Tengah
119. Bupati Bangka Selatan
120. Bupati Belitung Timur
121. Bupati Serang
122. Bupati Pandeglang
123. Bupati Lebak
124. Bupati Tangerang
125. Bupati Bogor
126. Bupati Sukabumi
127. Bupati Cianjur
128. Bupati Bekasi
129. Bupati Karawang
130. Bupati Purwakarta
131. Bupati Subang
132. Bupati Bandung
133. Bupati Sumedang
134. Bupati Garut
135. Bupati Tasikmalaya
136. Bupati Ciamis
137. Bupati Cirebon
138. Bupati Kuningan
139. Bupati Indramayu
140. Bupati Majalengka
141. Bupati Bandung Barat
142. Bupati Pangandaran

143. Bupati Semarang
144. Bupati Kendal
145. Bupati Demak
146. Bupati Grobogan
147. Bupati Pekalongan
148. Bupati Batang
149. Bupati Tegal
150. Bupati Brebes
151. Bupati Pati
152. Bupati Kudus
153. Bupati Pemasang
154. Bupati Jepara
155. Bupati Rembang
156. Bupati Blora
157. Bupati Banyumas
158. Bupati Cilacap
159. Bupati Purbalingga
160. Bupati Banjarnegara
161. Bupati Magelang
162. Bupati Temanggung
163. Bupati Wonosobo
164. Bupati Purworejo
165. Bupati Kebumen
166. Bupati Klaten
167. Bupati Boyolali
168. Bupati Sragen
169. Bupati Sukoharjo
170. Bupati Karanganyar
171. Bupati Wonogiri
172. Bupati Gresik
173. Bupati Mojokerto
174. Bupati Sidoarjo
175. Bupati Jombang
176. Bupati Sampang
177. Bupati Pamekasan
178. Bupati Sumenep
179. Bupati Bangkalan
180. Bupati Bondowoso
181. Bupati Situbondo
182. Bupati Banyuwangi
183. Bupati Jember
184. Bupati Malang
185. Bupati Pasuruan
186. Bupati Probolinggo
187. Bupati Lumajang
188. Bupati Kediri
189. Bupati Tulungagung
190. Bupati Nganjuk
191. Bupati Trenggalek
192. Bupati Blitar

193. Bupati Madiun
194. Bupati Ngawi
195. Bupati Magetan
196. Bupati Ponorogo
197. Bupati Pacitan
198. Bupati Bojonegoro
199. Bupati Tuban
200. Bupati Lamongan
201. Bupati Bantul
202. Bupati Sleman
203. Bupati Gunungkidul
204. Bupati Kulon Progo
205. Bupati Sambas
206. Bupati Sanggau
207. Bupati Sintang
208. Bupati Mempawah
209. Bupati Kapuas Hulu
210. Bupati Ketapang
211. Bupati Bengkayang
212. Bupati Landak
213. Bupati Melawi
214. Bupati Sekadau
215. Bupati Kubu Raya
216. Bupati Kayong Utara
217. Bupati Kapuas
218. Bupati Barito Utara
219. Bupati Barito Selatan
220. Bupati Kotawaringin Timur
221. Bupati Kotawaringin Barat
222. Bupati Pulang Pisau
223. Bupati Gunung Mas
224. Bupati Lamandau
225. Bupati Sukamara
226. Bupati Murung Raya
227. Bupati Katingan
228. Bupati Seruyan
229. Bupati Barito Timur
230. Bupati Kutai Kartanegara
231. Bupati Paser
232. Bupati Berau
233. Bupati Kutai Barat
234. Bupati Kutai Timur
235. Bupati Penajam Paser Utara
236. Bupati Mahakam Ulu
237. Bupati Banjar
238. Bupati Tanah Laut
239. Bupati Tapin
240. Bupati Hulu Sungai Selatan
241. Bupati Hulu Sungai Tengah
242. Bupati Barito Kuala

243. Bupati Tabalong
244. Bupati Kotabaru
245. Bupati Hulu Sungai Utara
246. Bupati Tanah Bumbu
247. Bupati Balangan
248. Bupati Bulungan
249. Bupati Malinau
250. Bupati Nunukan
251. Bupati Tana Tidung
252. Bupati Buleleng
253. Bupati Jembrana
254. Bupati Klungkung
255. Bupati Gianyar
256. Bupati Karangasem
257. Bupati Bangli
258. Bupati Badung
259. Bupati Tabanan
260. Bupati Lombok Barat
261. Bupati Lombok Tengah
262. Bupati Lombok Timur
263. Bupati Bima
264. Bupati Sumbawa
265. Bupati Dompu
266. Bupati Sumbawa Barat
267. Bupati Lombok Utara
268. Bupati Kupang
269. Bupati Belu
270. Bupati Timor Tengah Utara
271. Bupati Timor Tengah Selatan
272. Bupati Alor
273. Bupati Sikka
274. Bupati Flores Timur
275. Bupati Ende
276. Bupati Ngada
277. Bupati Manggarai
278. Bupati Sumba Timur
279. Bupati Sumba Barat
280. Bupati Lembata
281. Bupati Rote Ndao
282. Bupati Manggarai Barat
283. Bupati Manggarai Timur
284. Bupati Sumba Barat Daya
285. Bupati Nagekeo
286. Bupati Sumba Tengah
287. Bupati Sabu Raijua
288. Bupati Malaka
289. Bupati Minahasa
290. Bupati Bolaang Mongondow
291. Bupati Kepulauan Sangihe
292. Bupati Minahasa Selatan

293. Bupati Kepulauan Talaud
294. Bupati Minahasa Utara
295. Bupati Bolaang Mongondow Utara
296. Bupati Siau Tagulandang Biaro
297. Bupati Minahasa Tenggara
298. Bupati Bolaang Mongondow Selatan
299. Bupati Bolaang Mongondow Timur
300. Bupati Gorontalo
301. Bupati Boalemo
302. Bupati Pohuwato
303. Bupati Bone Bolango
304. Bupati Gorontalo Utara
305. Bupati Pasangkayu
306. Bupati Mamuju
307. Bupati Mamasa
308. Bupati Polewali Mandar
309. Bupati Majene
310. Bupati Mamuju Tengah
311. Bupati Poso
312. Bupati Donggala
313. Bupati Tolitoli
314. Bupati Banggai
315. Bupati Buol
316. Bupati Morowali
317. Bupati Banggai Kepulauan
318. Bupati Parigi Moutong
319. Bupati Tojo Una Una
320. Bupati Sigi
321. Bupati Banggai Laut
322. Bupati Morowali Utara
323. Bupati Pinrang
324. Bupati Gowa
325. Bupati Wajo
326. Bupati Bone
327. Bupati Tana Toraja
328. Bupati Maros
329. Bupati Luwu
330. Bupati Sinjai
331. Bupati Bulukumba
332. Bupati Bantaeng
333. Bupati Jeneponto
334. Bupati Kepulauan Selayar
335. Bupati Takalar
336. Bupati Barru
337. Bupati Sidenreng Rappang
338. Bupati Pangkajene dan Kepulauan
339. Bupati Soppeng
340. Bupati Enrekang
341. Bupati Luwu Utara
342. Bupati Luwu Timur

343. Bupati Toraja Utara
344. Bupati Konawe
345. Bupati Buton
346. Bupati Muna
347. Bupati Kolaka
348. Bupati Konawe Selatan
349. Bupati Kolaka Utara
350. Bupati Bombana
351. Bupati Wakatobi
352. Bupati Buton Utara
353. Bupati Konawe Utara
354. Bupati Kolaka Timur
355. Bupati Konawe Kepulauan
356. Bupati Buton Selatan
357. Bupati Buton Tengah
358. Bupati Muna Barat
359. Bupati Maluku Tengah
360. Bupati Maluku Tenggara
361. Bupati Buru
362. Bupati Kepulauan Tanimbar
363. Bupati Kepulauan Aru
364. Bupati Seram Bagian Barat
365. Bupati Seram Bagian Timur
366. Bupati Buru Selatan
367. Bupati Maluku Barat Daya
368. Bupati Halmahera Barat
369. Bupati Halmahera Tengah
370. Bupati Kepulauan Sula
371. Bupati Halmahera Selatan
372. Bupati Halmahera Utara
373. Bupati Halmahera Timur
374. Bupati Pulau Morotai
375. Bupati Pulau Taliabu
376. Bupati Fak-Fak
377. Bupati Kaimana
378. Bupati Manokwari
379. Bupati Manokwari Selatan
380. Bupati Pegunungan Arfak
381. Bupati Teluk Bintuni
382. Bupati Teluk Wondama
383. Bupati Biak Numfor
384. Bupati Jayapura
385. Bupati Keerom
386. Bupati Kepulauan Yapen
387. Bupati Mamberamo Raya
388. Bupati Sarmi
389. Bupati Supiori
390. Bupati Waropen
391. Bupati Asmat
392. Bupati Boven Digoel

393. Bupati Mappi
394. Bupati Merauke
395. Bupati Deiyai
396. Bupati Dogiyai
397. Bupati Intan Jaya
398. Bupati Mimika
399. Bupati Nabire
400. Bupati Paniai
401. Bupati Puncak
402. Bupati Puncak Jaya
403. Bupati Jayawijaya
404. Bupati Lanny Jaya
405. Bupati Mamberamo Tengah
406. Bupati Nduga
407. Bupati Pegunungan Bintang
408. Bupati Tolikara
409. Bupati Yahukimo
410. Bupati Yalimo
411. Bupati Maybrat
412. Bupati Raja Ampat
413. Bupati Sorong
414. Bupati Sorong Selatan
415. Bupati Tambrau
416. Walikota Sabang
417. Walikota Banda Aceh
418. Walikota Langsa
419. Walikota Lhokseumawe
420. Walikota Subulussalam
421. Walikota Medan
422. Walikota Tebing Tinggi
423. Walikota Binjai
424. Walikota Pematang Siantar
425. Walikota Tanjung Balai
426. Walikota Sibolga
427. Walikota Padangsidempuan
428. Walikota Gunung Sitoli
429. Walikota Pekanbaru
430. Walikota Dumai
431. Walikota Batam
432. Walikota Tanjungpinang
433. Walikota Bukittinggi
434. Walikota Padang Panjang
435. Walikota Sawahlunto
436. Walikota Solok
437. Walikota Padang
438. Walikota Payakumbuh
439. Walikota Pariaman
440. Walikota Jambi
441. Walikota Sungai Penuh
442. Walikota Palembang

443. Walikota Pagar Alam
444. Walikota Lubuk Linggau
445. Walikota Prabumulih
446. Walikota Bengkulu
447. Walikota Metro
448. Walikota Bandar Lampung
449. Walikota Pangkal Pinang
450. Walikota Tangerang
451. Walikota Cilegon
452. Walikota Serang
453. Walikota Tangerang Selatan
454. Walikota Bandung
455. Walikota Bogor
456. Walikota Sukabumi
457. Walikota Cirebon
458. Walikota Bekasi
459. Walikota Depok
460. Walikota Cimahi
461. Walikota Tasikmalaya
462. Walikota Banjar
463. Walikota Semarang
464. Walikota Salatiga
465. Walikota Pekalongan
466. Walikota Tegal
467. Walikota Magelang
468. Walikota Surakarta
469. Walikota Surabaya
470. Walikota Mojokerto
471. Walikota Malang
472. Walikota Pasuruan
473. Walikota Probolinggo
474. Walikota Blitar
475. Walikota Kediri
476. Walikota Madiun
477. Walikota Batu
478. Walikota Yogyakarta
479. Walikota Pontianak
480. Walikota Singkawang
481. Walikota Palangka Raya
482. Walikota Samarinda
483. Walikota Balikpapan
484. Walikota Bontang
485. Walikota Banjarmasin
486. Walikota Banjarbaru
487. Walikota Tarakan
488. Walikota Denpasar
489. Walikota Mataram
490. Walikota Bima
491. Walikota Kupang
492. Walikota Manado

493. Walikota Bitung
494. Walikota Tomohon
495. Walikota KotaMobagu
496. Walikota Gorontalo
497. Walikota Palu
498. Walikota Makassar
499. Walikota Parepare
500. Walikota Palopo
501. Walikota Kendari
502. Walikota Baubau
503. Walikota Ambon
504. Walikota Tual
505. Walikota Ternate
506. Walikota Tidore Kepulauan
507. Walikota Jayapura
508. Walikota Sorong

A. Jadwal Rencana Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2024

No	Kegiatan	Jadwal (Tentatif)	Jumlah Instansi
1.	Sosialisasi Evaluasi SPBE	16 – 18 Juli 2024	638 K/L/Pemda
2.	Penilaian Mandiri	17 Juli s/d 18 Agustus 2024	
3.	Penilaian Dokumen	19 – 20 September 2024	
4.	Penilaian Interview	25 September – 15 Oktober 2024	
5.	Penilaian Visitasi	November	

Catatan:

- 1) Sosialisasi Evaluasi SPBE diselenggarakan oleh Kementerian PANRB dan dihadiri oleh seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda)
- 2) Masing-masing perwakilan yang menjadi PIC Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengisi data diri pada tautan berikut <https://konfirmasi.menpan.go.id/index.php/event/408>
- 3) Penilaian Mandiri dilakukan oleh masing-masing Tim Asesor Internal K/L/Pemda melalui aplikasi <https://tauval.spbe.go.id>
- 4) Penilaian Dokumen dilakukan oleh para Asesor Eksternal yang telah ditetapkan Kementerian RB
- 5) Penilaian Interview merupakan proses klarifikasi dan validasi antara Asesor Eksternal Kementerian PANRB bersama dengan perwakilan/PIC dari K/L/Pemda (Jadwal akan disampaikan kemudian)
- 6) Penilaian Visitasi merupakan proses klarifikasi dan validasi yang dilakukan secara fisik dimana Asesor Eksternal bersama Kementerian PANRB akan mengunjungi K/L/Pemda (Jadwal akan disampaikan kemudian)
- 7) Jadwal setiap tahapan evaluasi SPBE dapat diakses melalui <https://tauval.spbe.go.id>
- 8) Informasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2024 akan kami sampaikan melalui perwakilan masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 9) Untuk informasi lebih lanjut, Perwakilan IPPD dapat menghubungi Tim Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE di nomor 021 7398381 – 89 ext 2111, dan/atau kontak berikut:
 - Arman Kurniawan (0852-2119-8920) untuk Narahubung Kementerian, Lembaga, Sekretaris Daerah Provinsi, dan Sekretaris Daerah Kota
 - Muthia Nur (0857-7310-1473) untuk Narahubung Jawa, Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara
 - Eka Bella (0895-3602-81347) untuk Narahubung Pemerintah Kabupaten di area Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Papua Barat.
 - Joshua Ariel Perkasa (0856-5101-5615) untuk Akun Aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE.